

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap EBT di Kabupaten Cianjur telah dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi yang meliputi pencatatan dan integrasi data. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Disbudpar Cianjur telah menginventarisasi 28 EBT. Kendala pada proses inventarisasi antara lain luasnya wilayah Cianjur, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan hambatan dalam memperoleh informasi terkait suatu EBT. Inventarisasi EBT merupakan wujud perlindungan defensif yaitu perlindungan yang digunakan untuk mempertahankan hak komunitas asal yang sudah ada dari penyalahgunaan (*misuse*), pengelabuan, penipuan, atau pernyataan yang salah (*misrepresentation*), dan pencurian atau pembajakan (*misappropriation*). Berdasarkan *reward theory*, *recovery theory*, *risk theory*, dan *economic growth stimulus theory* maka inventarisasi EBT mencerminkan pengakuan, pemulihan hak, pencegahan risiko, dan pemanfaatan ekonomi yang sah dan terkontrol atas EBT Kabupaten Cianjur. Namun inventarisasi tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan defensif menyeluruh dengan sistem kekayaan intelektual komunal. Fungsi inventarisasi sebagai sarana pencegahan terhadap klaim pihak lain dan sebagai jaminan kepastian hukum bagi komunitas pemilik EBT belum sepenuhnya tercapai.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Disbudpar Cianjur dalam menjaga EBT dilaksanakan melalui kegiatan antara lain fasilitasi sanggar seni, audiensi dengan Dewan Kesenian Cianjur, Paguyuban Pasundan, dan Komite Ekonomi Kreatif. Upaya memelihara EBT Kabupaten Cianjur dilakukan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah beserta masyarakat Kabupaten Cianjur seperti kegiatan ujian akhir resital tari, expo karya siswa, pasanggiri mamaos cianjuran, pekan kebudayaan Cianjur, nanggala festival, budaya saba sakola, pagelaran mamaos cianjuran, silaturahmi dan diskusi budaya, serta pendampingan wisatawan mancanegara. Upaya menjaga dan memelihara EBT Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat mencerminkan upaya mempertahankan hak alamiah yang dimiliki terhadap suatu EBT yang sifat kepemilikannya komunal. Upaya menjaga dan memelihara EBT merupakan bentuk konkret pemenuhan hak budaya masyarakat lokal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pewarisan budaya. Masyarakat dan komunitas budaya turut berperan aktif melalui pelestarian tradisi secara turun-temurun, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan, serta keterlibatan dalam proses inventarisasi. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat menunjukkan upaya penjagaan dan pemeliharaan EBT telah berjalan meskipun memerlukan penguatan agar memberikan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk Bupati Kabupaten Cianjur

Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati khususnya berkaitan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, verifikasi, dan pembentukan tim untuk verifikasi pada proses inventarisasi. Peraturan Bupati dibutuhkan agar memuat pengaturan yang lebih rinci dan menjamin kepastian hukum seperti pengaturan terkait batas-batas waktu dalam proses inventarisasi KIK. Misalnya batas waktu verifikasi persyaratan administratif dan batas waktu melengkapi kekurangan persyaratan administratif, serta pembentukan tim dengan pembagian tugas yang jelas untuk melaksanakan inventarisasi. Pengaturan terkait batas waktu memberi rasa aman dan nyaman bagi komunitas asal yang mengajukan permohonan sekaligus memberikan target yang jelas untuk para pegawai berkaitan tenggat waktu penyelesaian verifikasi dokumen yang menjadi tanggung jawab mereka. Pengaturan tenggat waktu juga berfungsi untuk memberi konsekuensi misalnya jika melewati batas waktu melengkapi persyaratan administratif maka permohonan harus diajukan kembali dari awal.

2. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur

Menyesuaikan jumlah sumber daya manusia yang tersedia di setiap instansi termasuk di Disbudpar Cianjur sesuai kebutuhan dan beban

kerja yang harus diselesaikan agar proses inventarisasi terlaksana dengan baik sebagai wujud perlindungan terhadap EBT.

3. Untuk Disbudpar Cianjur dan Masyarakat Kabupaten Cianjur

Peningkatan program kerja yang berkontribusi langsung terhadap upaya menjaga dan memelihara EBT Kabupaten Cianjur. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengenal, melestarikan, menjaga, dan memelihara EBT Kabupaten Cianjur. Era digital saat ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari informasi positif salah satunya berkaitan dengan betapa pentingnya untuk mencintai kebudayaan yang dimiliki yang bermuara pada komitmen kuat untuk melestarikan, menjaga, dan memelihara EBT Kabupaten Cianjur. Diperlukan peningkatan komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kebudayaan agar memperoleh dukungan penuh dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.